

Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah Tahun 2024-2026

Oleh:
Supriyadi
Perencana Ahli Utama, Kementrian PPN/Bappenas

Konsultasi Publik Perubahan RPJMD 2021-2026
Samarinda, 13 Februari 2023

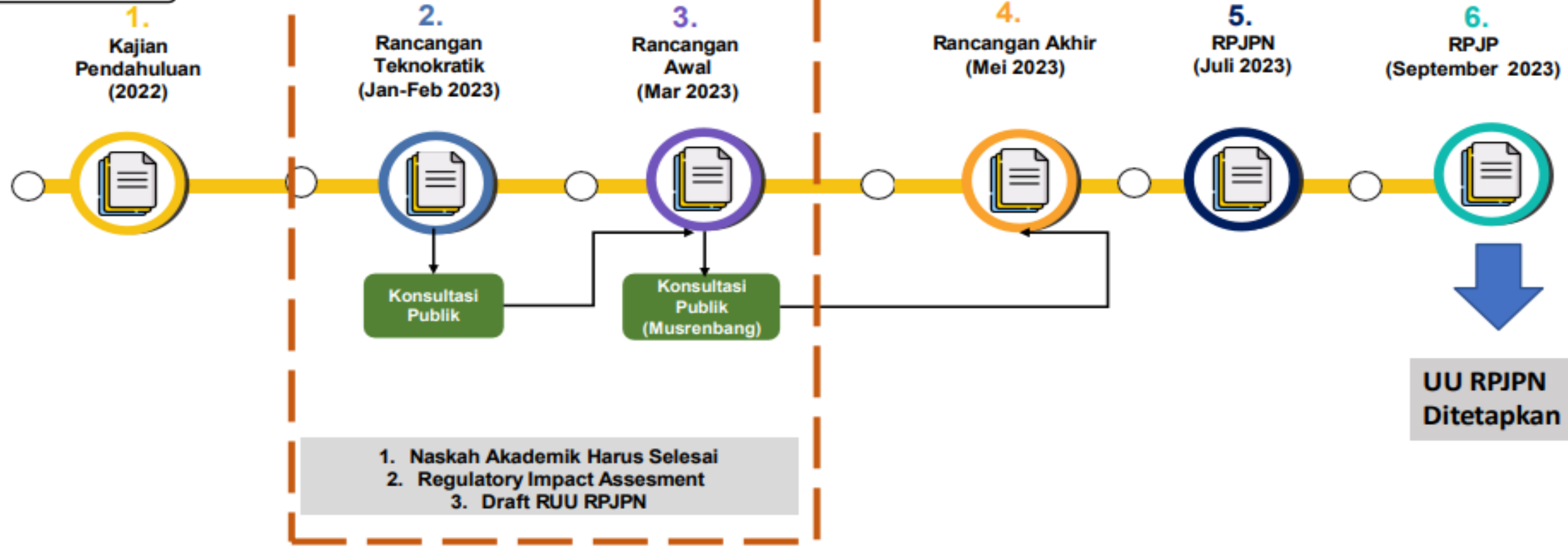
UU No 25 tahun 2004 tentang SPPN

- **Pasal 4 ayat 1** : RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam **Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.**
- Penjelasan Pasal 4 ayat 1 : Arah pembangunan Nasional adalah **strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.**

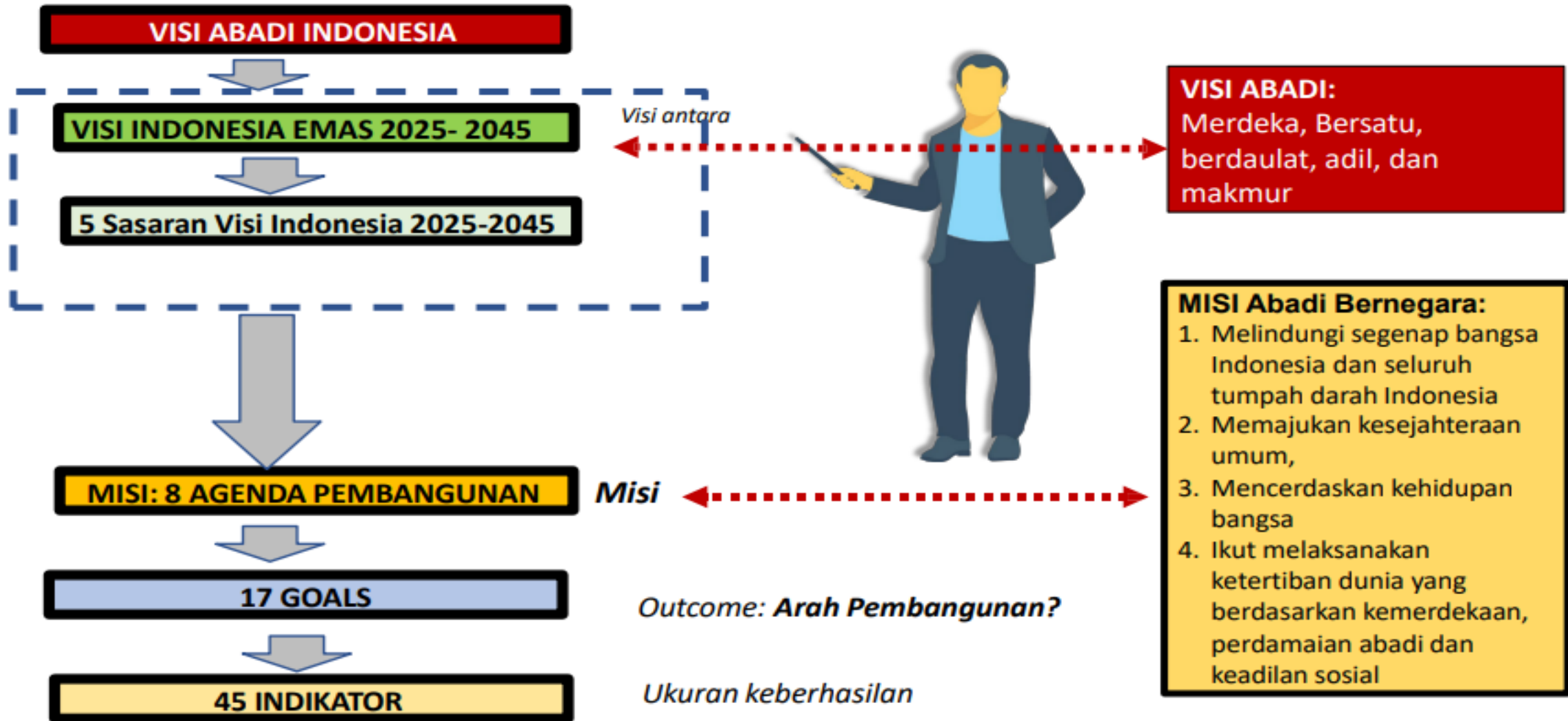
UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025

- **Pasal 3** : RPJP Nasional merupakan penjabaran dari **tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.**
- **Pasal 4** : RPJPN menjadi pedoman dalam RPJMN yang memuat **visi, misi dan program Presiden**

Substansi RPJPN



Alur Pikir RPJPN 2025-2045





KEBIJAKAN WILAYAH
Untuk mengurangi
ketimpangan

Kondisi Perlu/Enabler TRANSFORMASI

**Stabilitas dan
Pembiayaan**

**Ketahanan
SosioEkologi**

KAJIDAH PELAKSANAAN

IKN Baru : Mempercepat Pertumbuhan Wilayah Penyangga

Penetapan Ibu Kota Negara (IKN) baru pada akhirnya mengakselerasi fungsi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar IKN. Dorongan investasi dan aktivitas ekonomi lainnya, disamping penanganan kebutuhan IKN, akan semakin gencar pada wilayah-wilayah penyangga sekitar IKN. Hadirnya IKN tentu akan memberikan dampak perubahan struktur pertumbuhan daerah-daerah di sekitar IKN dalam bentuk penetapan pusat-pusat pertumbuhan wilayah penyangga IKN berbasis pada kapasitas dan potensi yang dimiliki wilayah penyangga IKN.

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN TIMUR

Kabupaten/Kota	IPM		HLS		RLS		UHH		PP	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Paser	72,93	73,44	13,25	13,27	8,79	8,8	72,88	72,89	10673	11181
Kutai Barat	72,07	72,92	13,02	13,09	8,7	8,78	73,1	73,1	10062	10740
Kutai Kartanegara	74,06	74,67	13,6	13,63	9,23	9,24	72,64	72,65	11048	11677
Kutai Timur	73,81	74,35	12,9	13	9,43	9,44	73,46	73,47	10868	11322
Berau	75,2	75,74	13,33	13,35	9,53	9,54	72,32	72,32	12435	13095
Penajam Paser Utara	72,01	72,55	12,57	12,7	8,36	8,51	71,68	71,71	11651	11890
Mahakam Ulu	67,95	68,75	12,61	12,62	8,18	8,36	72,33	72,35	7802	8215
Kota Balikpapan	80,71	81,13	14,22	14,23	10,91	10,92	74,76	74,78	14862	15455
Kota Samarinda	80,76	81,43	15,09	15,1	10,49	10,71	74,54	74,56	14582	15162
Kota Bontang	80,59	80,94	13,17	13,18	10,8	10,81	74,55	74,57	16765	17327

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN TIMUR

Kabupaten/Kota	LPE		Tingkat Kemiskinan		Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kemiskinan		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		TPT		Rasio Gini	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Paser	5,41		9,73	9,43	27,56	27,02	1,37	1,35	0,32	0,29	5,7	4,88	0,288	0,282
Kutai Barat	4,18		10,24	10,2	15,38	15,38	1,07	1,56	0,21	0,42	5,14	4,62	0,317	0,300
Kutai Kartanegara	2,67		7,99	7,96	62,36	62,87	1,22	1,18	0,37	0,26	5,66	4,14	0,283	0,269
Kutai Timur	-1,01		9,81	9,28	37,78	36,84	1,64	2,33	0,44	0,78	5,35	6,48	0,328	0,304
Berau	5,36		5,88	5,65	13,62	13,31	0,95	0,98	0,2	0,22	5,82	5,02	0,377	0,352
Penajam Paser Utara														
Mahakam Ulu	-1,69		7,61	7,25	12,13	11,59	1,18	1,07	0,3	0,25	2,95	2,12	0,263	0,274
Kota Balikpapan	1,27		11,9	11,55	3,18	3,1	1,77	2,08	0,37	0,58	3,14	2,44	0,270	0,288
Kota Samarinda	2,76		4,99	4,85	42,84	41,95	1,07	0,59	0,32	0,13	8,16	6,78	0,322	0,346
Kota Bontang	1,6		4,62	4,54	8,41	8,39	0,47	0,37	0,08	0,05	9,92	7,81	0,340	0,324

SINKRONISASI RPJPD-RPJMD-RPJMN

RPJPD

GAMBARAN UMUM

PERMASALAHAN

ISU STRATEGIS

VISI MISI

TUJUAN DAN SASARAN

ARAH KEBIJAKAN, SASARAN POKOK

ARAH KEBIJAKAN, SASARAN POKOK

TAHAPAN PEMBANGUNAN

RPJMD

GAMBARAN UMUM

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

PERMASALAHAN

ISU STRATEGIS

VISI MISI

TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM

STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

FOKUS

PRIORITAS

PROGRAM PRIORITAS

KERANGKA PENDANAAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

RPJMN

RPJMN 2020-2024

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS

MENGEMBANKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

MENINGKATKAN SDM DAN BERDAYA SAING

REVOLUASI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UTK Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

MEMBANGUN LH, KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MP)

MATRIK PEMBANGUNAN

ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH

KONSISTENSI RPJPD DAN RPJMD

- Dokumen RPJPD dapat diimplementasikan dan terwujud apabila (a) adanya ***indikator tujuan dan sasaran tiap misi***, (b) dan indikator tersebut dijabarkan ke dalam ***lima tahunan***. Dengan demikian maka RPJPD akan mempunyai keterkaitan nyata (tangible) dengan dokumen RPJMD

KETERKAITAN RKP-RKPD-RPJMD

RPJMD

GAMBARAN UMUM

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

PERMASALAHAN

ISU STRATEGIS

VISI MISI

TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM

FOKUS

PRIORITAS

PROMGRAM PRIORITAS

KERANGKA PENDANAAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

RKPD

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM

PERMASALAHAN

ISU STRATEGIS

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

SASARAN DAN PRIORITAS

TUJUAN DAN SASARAN

TEMA

PRIORITAS

PROGRAM PRIORITAS

ARAH KEBIJAKAN

KERANGKA PENDANAAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

RKP

SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

EVALUASI

KERANGKA EKONOMI MAKRO

STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH

STRATEGI PENDANAAN PEMBANGUNAN

TEMA DAN SASARAN

PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

KETERKAITAN RPD-RKPD-RPJMD

RPD

GAMBARAN UMUM

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

PERMASALAHAN

ISU STRATEGIS

TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM

FOKUS

PRIORITAS

PROMGRAM PRIORITAS

KERANGKA PENDANAAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

RKPD

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM

PERMASALAHAN

ISU STRATEGIS

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

SASARAN DAN PRIORITAS

TUJUAN DAN SASARAN

TEMA

PRIORITAS

PROGRAM PRIORITAS

ARAH KEBIJAKAN

KERANGKA PENDANAAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

RKP

SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

EVALUASI

KERANGKA EKONOMI MAKRO

STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH

STRATEGI PENDANAAN PEMBANGUNAN

TEMA DAN SASARAN

PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

SINKRONISASI PUSAT-DAERAH

INDEKS PERENCANAAN KOMPONEN
SINKRONISASI PUSAT DAERAH

INDIKATOR KINERJA
UTAMA - REGIONAL

SEB RPJMD –
RPJMN 2020-2024

PENYELARASAN

RPJMD –RPJMN
2020-2024

RKPD –RKP

FASILITASI RPJMD/RPD

RAKORTEK

1. DESK MAKRO – Penyelesaian indicator Makro
2. DESK URUSAN – Penyelesaian indicator urusan

MUSRENBANGNAS

FASILITASI RANKHIR RKPD

Kualifikasi dan
Kompetensi Perencana

PELATIHAN
PERENCANAAN

DANA
DEKONSENTRASI

DIKLAT
PUSBINDIKLATREN

SIPD

NILAI PPD

- Permendagri ttg Penyusunan RKPD
- Permendagri ttg Penyusunan APBD

KUALITAS RPJMN 2020-2024

PERAN REGIONAL MENGONTROL INDIKATOR
DAN TARGET YANG TERKAIT DENGAN DAERAH



Thank You.